

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan metode modifikasi yang dilakukan dengan tujuan mencapai kebaikan secara berkelanjutan yang sejalan dengan harapan pemerintah guna memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat. Suatu daerah perlu transformasi pembangunan berkelanjutan yang terarah dan terencana. Evaluasi dan pembaruan rutin perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan tetap relevan dan berfokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan positif dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

Manusia sebagai sumber daya yang memiliki suatu peranan penting guna menunjang pembangunan ekonomi, khususnya pada negara berkembang termasuk juga Indonesia. Pada dasarnya pembangunan yang melibatkan manusia, dalam prosesnya menggunakan seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Parameter keberhasilan pembangunan dapat diketahui salah satunya dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Guna meningkatkan IPM, setiap negara dapat melakukan pembangunan ekonomi dengan mengarahkan segala usaha dan upaya dari pemerintah, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, menuntaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan serta meminimalisir ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Seluruh aspek tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan

apabila pemerintah merancang dan menyusun strategi yang tepat (Syofya, 2018).

IPM diperkenalkan oleh United Nation for Development (UNDP) pada tahun 1990 dan kemudian dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR), IPM mencakup beberapa dimensi kesejahteraan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam beberapa dekade terakhir, IPM telah menjadi fokus utama perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional, karena kemampuannya untuk memberikan gambaran holistik tentang kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan manusia (BPS, 2023b).

Salah satu indikator taraf hidup manusia yaitu IPM yang dapat diukur melalui kualitas kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Ketiga indikator tersebut nantinya dapat memberikan efek yang maksimal sehingga berdampak langsung pada meningkatnya taraf hidup masyarakat (Astriani et al., 2021). Tujuan akhir dari proses pembangunan ialah dapat menyejahterahkan masyarakat, dimana dalam hal ini rakyat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga diharapkan akan menjadi subjek dalam pembangunan yang dapat memberikan suatu kontribusi yang berdampak besar untuk memajukan suatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purwakarta lebih unggul daripada nilai Indeks Pembangunan Manusia di wilayah sekitarnya yang meliputi Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang (di wilayah bagian Timur),

Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang (di wilayah bagian Selatan) dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang (di wilayah bagian Barat). Namun, meskipun demikian, pada tahun 2021, IPM Kabupaten Purwakarta menempati peringkat ke-15 dari 28 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat. Hal ini mengalami penurunan satu peringkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang dimana pada tahun tersebut IPM Kabupaten Purwakarta menempati peringkat ke-14 (Pengantar, 2020).

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Jawa Barat 2020-2021

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021
1.	Kota Bandung	81.96	82.50
2.	Kota Bekasi	81.95	82.46
3.	Kota Depok	81.37	81.86
4.	Kota Cimahi	78.06	78.77
5.	Kota Bogor	76.59	77.17
6.	Kota Cirebon	75.25	75.89
7.	Kota Sukabumi	74.60	75.40
8.	Kab. Bekasi	74.45	75.22
9.	Kota Tasikmalaya	73.31	73.83
10.	Kab. Bandung	72.73	73.16
11.	Jawa Barat	72.45	73.12
12.	Kab. Sumedang	71.80	72.69
13.	Kota Banjar	71.92	72.55
14.	Kab. Karawang	70.94	71.74
15.	Kab. Purwakarta	70.98	71.56
16.	Kab. Ciamis	70.93	71.45
17.	Kab. Bogor	70.60	71.20
18.	Kab. Kuningan	69.71	70.16
19.	Kab. Cirebon	69.12	70.06
20.	Kab. Subang	69.13	69.87
21.	Kab. Bandung Barat	68.29	69.04
22.	Kab. Pangandaran	68.28	69.03
23.	Kab. Majalengka	67.81	68.56
24.	Kab. Indramayu	67.64	68.55
25.	Kab. Sukabumi	67.07	67.64
26.	Kab. Garut	66.45	67.41
27.	Kab. Tasikmalaya	65.90	66.84
28.	Kab. Cianjur	65.56	65.94

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Isu ekonomi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Di Kabupaten Purwakarta, perlahan-lahan terdapat peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta mencapai angka 70,82 dan mengalami peningkatan sebanyak 0,23%, sehingga mencapai nilai 70,98. Selanjutnya, pada tahun 2020, nilai IPM tetap berada pada kategori sedang, sejalan dengan tahun 2019. Kabupaten Purwakarta menempati peringkat pertama dari total 5 Kabupaten yang ada disekelilingnya pada tahun tersebut. Berikut adalah pertumbuhan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta.

Gambar 1.1 Grafik Indeks Pembanguna Manusia Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta meningkat setiap tahunnya, meskipun pertumbuhannya tergolong kecil, dan tetap berada di bawah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat.

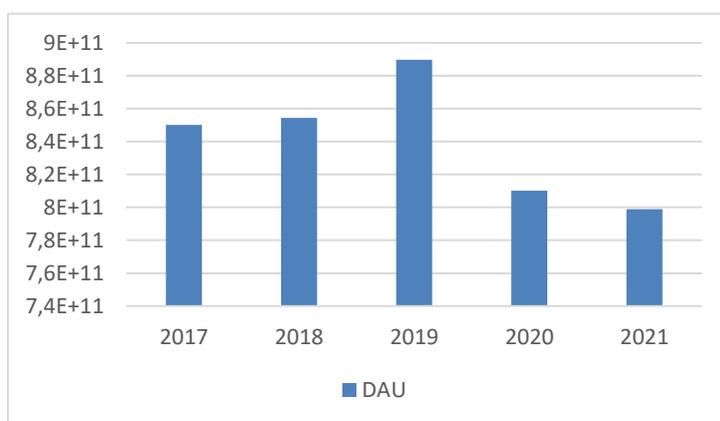
Guna meningkatkan IPM, diperlukan usaha-usaha untuk menyebarkan pembangunan bukan hanya melalui pertumbuhan ekonomi saja (Imanulloh dan Purwanti, 2017). Selain itu, Imanulloh dan Purwanti (2017) juga mengungkapkan bahwa dengan pembangunan yang lebih merata, seluruh penduduk akan memiliki peluang lebih besar untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Salah satu langkah untuk memajukan pembangunan adalah melalui penerapan sistem desentralisasi dalam pengelolaan dan regulasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Imanulloh dan Purwanti, 2017). Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri dan mengalokasikannya untuk mendukung prioritas pembangunan sesuai dengan harapan masyarakatnya (Priambodo dan Noor, 2015).

Mengenai disparitas pembangunan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah kesulitan pemerintah pusat dalam mengawasi penggunaan dana untuk pendapatan dan pengeluaran di tingkat daerah.

Kemudian, Primanto selaku ketua DJPK juga mengungkapkan bahwa penyerapan APBD tidak optimal karena menurut pengamatannya, dana daerah lebih dominan digunakan untuk biaya pegawai daripada untuk pelaksanaan program pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen dana pertimbangan bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah perlu optimal

dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerah agar dapat dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan belanja daerah, yang secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan masyarakat (Imanulloh dan Purwanti, 2017). Dana dialokasikan dalam bentuk belanja modal, yang digunakan untuk berinvestasi dalam peralatan bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan standar pelayanan publik (Suparwati, 2012). Pemakaian belanja modal akan mengakibatkan peningkatan aset pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Siswadi, Pituringsih, dan Irwan, 2015).

Gambar 1.2 Dana Alokasi Umum Kab. Purwakarta



Sumber : Bada Pusat Statistik (data diolah)

Dari grafik diatas jumlah anggaran realisasi DAU mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya yang mana pada tahun 2019 sebesar Rp. 889.747.462. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 810.270.915. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 799.002.962. Hal ini, artinya jumlah transfer pemerintah pusat terhadap

daerah tidak pasti menurun atau meningkat disetiap tahunnya tergantung celah fiskal dan alokasi dasar pada Kabupaten Purwakarta. Yang mana perubahan kondisi fiskal di daerah ini sangat berpengaruh terhadap target pembangunan yang sudah ditetapkan sejak awal tahun anggaran.

Pendidikan juga merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan manusia karena memiliki peran sentral dalam meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam menyerap teknologi modern dan memperkuat kapasitas untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan manusia, kontribusi pendidikan dapat diamati melalui pengukuran rata-rata lama sekolah. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki potensi yang lebih besar untuk memajukan perkembangan manusia dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Ketika peluang kerja terbatas bagi individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, maka individu cenderung akan berusaha untuk meningkatkan tingkat pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan kemampuan suatu daerah untuk mencapai tingkat indeks pembangunan manusia (Arofah & Rohimah, 2019). Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan individu yang dapat menyebabkan rendahnya produktivitas. Peristiwa ini akan mempengaruhi pekerjaannya. Rendahnya tingkat pendidikan individu menyebabkan pengangguran. Hal ini menambah kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya (Pradipta & Dewi, 2020).

Gambar 1.3 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Purwakarta



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa persentase Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Purwakarta mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah Kabupaten Purwakarta sebesar 7,82%, lalu pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan sebesar 6,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat yang belum bisa menyelesaikan target pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) dikarenakan pembangunan sarana pendidikan terbatas. Kemudian pada tahun 2021 persentase rata-rata lama sekolah Kabupaten Purwakarta mengalami kenaikan sebesar 7,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan di wilayah tersebut sudah mulai memadai sehingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan.

Menurut Arofah & Rohimah (2019), rata-rata lama sekolah dinilai memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan dengan indeks pembangunan manusia. Namun, terkait hal ini ternyata berbeda dengan pandangan Rifa'i, Ahmad and Hartono (2017), dimana mereka berpendapat terkait hal tersebut tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap indeks

pembangunan manusia. Melihat berbagai sudut pandang dan argumentasi dari para ahli terkait hal ini, penulis terdorong untuk meneliti dan meninjau lebih jauh terkait dengan hubungan dan pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap aspek-aspek indeks pembangunan manusia di Kabupaten Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta memiliki berbagai potensi yang dapat mendorong perkembangan dan pembangunan daerah, terutama dalam sektor ekonomi, industri, pertanian, dan pariwisata. Dengan kekayaan kultural dan potensi yang dimilikinya, Purwakarta menjadi sebuah wilayah yang dinamis dan terus mengalami pertumbuhan. Dalam 10 tahun terakhir dari data tahun 2010, penambahan penduduk mencapai 145.000 ribu jiwa (data sensus penduduk hingga November 2020) jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta adalah 996.000 jiwa yang didominasi kelompok usia sekolah dan kelompok produktif. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta cukup memiliki SDM potensi untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan ekonomi suatu negara selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses pertumbuhan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Karena secara umum pembangunan ekonomi diartikan sebagai rangkaian upaya suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya agar lebih banyak tersedia infrastruktur, usaha tumbuh, tingkat pendidikan yang meningkat, dan teknologi yang meningkat.

Gambar 1.4 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta mengalami fluktuatif disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebesar 5,15% dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar -2,13%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia terkena dampak dari pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta mengalami kenaikan kembali sebesar 3,42%. Dimana pada tahun 2021 perlahan sudah mulai membaik dan jika dilihat daya beli masyarakat dalam melakukan pembelian barang atau jasa juga menjadi salah satu faktor.

Hasil penelitian yang berbeda yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut membuktikan adanya hubungan antara dana alokasi umum, pendidikan dan juga perekonomian dengan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, peneliti termotivasi dalam menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan.

Manusia (IPM). Dimensi pendidikan yang terdapat pada variabel Rata-rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga dimensi perekonomian yang terdapat pada variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purwakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta?
2. Apakah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta
2. Untuk menganalisa pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta
3. Untuk menganalisa pengaruh Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta

1.4 Ruang Lingkup

Sebagai upaya untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari penelitian ini maka diperlukan adanya ruang lingkup penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis berfokus pada Dana Alokasi Umum, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Begitupun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis :

Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan pada bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Secara Praktisi :

- a. Bagi Pemerintah, harapannya mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan daerah serta alokasinya terhadap indeks pembangunan manusia.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sumber acuan untuk memperkuat pernyataan dalam penelitian dengan variabel yang berlainan namun pada tema pembahasan yang sama.